

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*. Palembang. 2006.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*, New York, N.J. : Holt, Reinhart and Winston.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik* . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bluman, Allan G. 2001. *Elementary Statistics A Step by Step Approach*. Fourth Edition. McGraw-Hill, New York.
- Caporaso, J.A dan Levine, D.P. 1992. *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press, terjemahan cetakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008.
- Chairi, Anis dan Imam Gozali. 2003. Teori Akuntansi. Semarang. BP UNDIP.
- Cooper, D.R dan Schindler, P.S. 2008. *Bussines Research Methods. 10 th Edition*. New York –USA : McGraw-Hill Companies, Inc.
- Christina J. Scheider. 2009. Fighting with one hand tied behind the back: political budget cycles in the West German states. *This article published with open cces at Springerlink.c*.
- Darmastuti, Dewi dan Setyaningrum, Dyah. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV*. Banjarmasin.
- Dobell, Peter dan Martin Ulrich. 2002. *Parliament's performance in the budget process: A case study*. Policy Matters 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Fajri, Em Zul dan Ratu A Senja. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.

- Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting— Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Fozzard, Adrian. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting*. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.
- Garamfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. *Paper presented at 8th International Anti-Corruption Conference*, Lima, Peru, 7-11 September.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim dan Abdullah,S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: *Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1)*: 53-64.<http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- H.M, Jogiayanto. 2004. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman, Edisi Pertama*. Cetakan Kedua. Penerbit BPFE- Yogyakarta 2009.
- Kawedar dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Keefer, Philip dan Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Dana Bansos Rawan di Korupsi Jelang Pemilu*. Jakarta. Di akses 15 Februari 2014 jam 10;27 AM
<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1669-kpk-dana-bansos-rawan-dikorupsi-jelang-pemilu>
- Lalvani, Mala. 1999. Elections and Macropolicy Signals: Political Budget Cycle Hypothesis.*Economic and Political Weekly Journal, Vol. 34, No. 37 (Sep. 11-17, 1999)*, pp. 2676-2681 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4408401> . Accessed: 25/03/2014 00:02
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik, edisi keempat*. Penerbit Andi C.V. Yogyakarta, 2009.
- Martinez-Vazquez, Jorge, F. Javier Arze, dan Jameson Boex. 2004. *Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management*.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945- Amandemen III Tahun 2001*;

_____, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.*

_____, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;*

_____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.*

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.*

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.*

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.*

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.*

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peratutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.*

Ritonga, Taufiq dan Alam, Mansur Iskandar. 2010. Apakah Incumbent memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)X*. Purwokerto.

Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.

Yuwani, Indrati Isti. 2011. Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent dan Daerah non Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilu. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Tanzi dan Davoodi. 1997. Corruption, Public Investment, and Growth. *IMF Working Paper No. 97/139*

Tanzi, Vito dan Hamid Davoodi. 2002. Corruption, public investment, and growth, dalam Abed, George T. dan Sanjeev Gupta (eds.). 2002. *Governance, Corruption, dan Economic Performance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

<http://politik.kompasiana.com/2013/05/28/pilkada-habiskan-uang-negara-30-trilyun-hanya-memilih-calon-koruptor-563870.html>, di unduh pada tanggal 04-01-2014.

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/01/269558467/Potensi-Korupsi-pada-Pemilu-2014-Sangat-Besar>, di unduh pada tanggal 06-02-2014.

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/29/19335279/sitemap.html/belanja-bantuan-sosial-cenderung-meningkat-pada-saat-pilkada>, di unduh pada tanggal 28-01-2014.

<http://seagames.sindonews.com/read/2014/03/01/13/840198/tahun-politik-apbd-rawan-diselewengkan>, di unduh pada tanggal 29-01-2014.

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/479252-belanja-bansos-menggelembung-jelang-pemilu>, di unduh pada tanggal 23-02-2014.